

PENGARUH SUMBERDAYA APARATUR TERHADAP AKUNTABILITAS DANA PUBLIK DENGAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMODERASI

IgnatiaKusuma Cahyani¹,Pancawati Hardiningsih², Ira Setiawati³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank,

³Universitas PGRI Semarang

¹pancawati@edu.unisbank.ac.id,²ignatiacahyani@gmail.com, seruni_78@yahoo.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya aparatur terhadap akuntabilitas alokasi dana desa dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. Analisis akuntabilitas alokasi dana desa dilakukan pada setiap tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban. Penelitian dilakukan di 18 desa wilayah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan jumlah sampel sebanyak 115 aparat desa yang terdiri yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, tim pelaksana kegiatan, badan musyawarah desa, kepala seksi, dan kepala urusan. Teknik analisis Sruktural Equisition Models dengan Warp Partial Least Square digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas alokasi dana desa pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban. Demikian juga tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sumber daya aparatur terhadap akuntabilitas alokasi dana desapada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban. Namun tidak memoderasi untuk tahap penatausahaan. Pemerintah daerah perlulebih intensif dalam memberikan pelatihan sistem keuangan desa agar akuntabilitas menjadi lebih baik.

Kata Kunci: *Sumber Daya Aparatur, Pendidikan, Akuntabilitas Alokasi Dana Publik*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of apparatus resources on the accountability of the allocation of public funds with the level of education as moderating. Accountability analysis of allocation of public funds is carried out at each stage of planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. The study was conducted in 18 villages in the Undaan Sub-District of Kudus Regency with a total sample of 115 village officials consisting of the village head, secretary, treasurer, activity implementation team, village consultative body, section head, and head of affairs. The analysis technique of structural Equisition Models with Warp Partial Least Square is used to test the research hypothesis. The results show that apparatus resources have a positive effect on the accountability of public funds allocation at the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages. Likewise the level of education moderates the influence of apparatus resources on the accountability of the allocation of public funds at the planning, implementation, reporting, and accountability stages. But it does not moderate for the administration stage. Local governments need to be more intensive in providing training in the village financial system so that accountability becomes better.

Keywords: Apparatus Resources, Education, Accountability for Public Fund Allocation

1. PENDAHULUAN

Alokasi dana desa diberikan ke desa di Indonesia setiap tahun dengan jumlah tertentu. Adanya alokasi dana desatersebut, pemerintah pusat mengharapkan bahwa pemerintah desa dapat berkembang menjadi wilayah yang maju dan mandiri. Mengingat besarnya pengalokasian dana desa yang diterima setiap masing – masing desa. Oleh karena itu, Alokasi Dana Desaperlu dikelola dengan baik agar bisa digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Agar pengelolaan alokasi dana desadapat dikelola dengan baik, maka di butuhkan suatu mekanisme pengelolaan yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban[11].

Adanya mekanisme tersebut, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa.[4] menjelaskan tentang akuntabilitas yang merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan secara berkala. Adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, maka akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Baik atau tidaknya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desatidak hanya ditentukan dari mekanisme pengelolaan yang terdiri dari 5 (lima) tahap tersebut. Namun juga adanya dukungan dari sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa. Untuk membentuk suatu sumber daya aparatur yang baik, maka masing – masing aparat harus memiliki komitmen dalam organisasi. Dengan adanya komitmen organisasi, maka sumber daya aparatur akan lebih

bertanggungjawab terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai akuntabilitas sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendukung terlaksananya akuntabel, maka membutuhkan sumberdaya dengan pendidikan yang memadai. Pendidikan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun melalui beberapa pelatihan ketrampilan khusus untuk mendukung kompetensi. Kondisi demikian terjadi di Kabupaten Kudus, dalam mengalokasikan dana publik dari pemerintah Kabupaten Kudus ke wilayah Kecamatan Undaan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 81,22 miliar dan ke tahun 2017 sebesar 103,6 miliar. Namun dari peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana desa, dimana masih ada beberapa aparat desa yang masih rendah ketrampilan dalam menunjang kompetensi maupun pengetahuan. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki berpengaruh pada pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu terdapat beberapa desa yang tidak menerapkan sistem transparansi dalam penerimaan alokasi dana desa dan masih ada keterlambatan dalam pencairan dana publik. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan pengawasan lebih agar pelaksanaan dan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber daya aparat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa dan tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sumber daya aparat terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dalam hal ini kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas suatu kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi ini pada akhirnya akan akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut *Donaldshon* dan *Davis* (1991) dalam *CN Lewier* (2016).

Dalam teori ini pemerintah berperan sebagai steward yang dimana tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Tetapi lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang disebut juga *principal*, hal ini menghindari adanya konflik kepentingan antara steward dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi. steward akan lebih mementingkan kepercayaan public [10]. Hal yang mendasarinya adalah prinsip bahwa *steward* merasa memiliki suatu tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan atas alokasi sumber daya yang ada dengan cara yang bijaksana dan hati – hati demi melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi mereka, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, steward merasa bahwa aktualisasi dirinya sudah terpenuhi dan dengan kepercayaan publik yang diperoleh, maka mereka tidak lagi menginginkan materiil[3].

Penerapan teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran pemerintah desa (*stewards*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan desa guna terselenggarakannya tujuan ekonomis[12], dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap *principal* (masyarakat) maka pemerintah desa (*stewards*) melakukan kontrol internal untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sumber Daya Aparatur Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Sumber daya aparat adalah suatu kemampuan yang dimiliki aparat untuk melakukan suatu pekerjaan dan komponen penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, sumber daya aparat harus mempunyai kompetensi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparat akan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa[8]. Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian seperti[1] yang menyatakan bahwa keseluruhan aparat desa di kabupaten Pidie sudah siap dalam pengelolaan desa, namun masih ada sedikit kendala yaitu kurangnya sumberdaya manusia yang handal dan faham mengenai keuangan desa. Penelitian [5] menyatakan bahwa kesiapan sumber daya aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil serupa [2] menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hubungan sumber daya aparat dengan akuntabilitas alokasi dana desa dapat dijelaskan dengan *stewardship theory*, bahwa eksekutif sebagai pengelola memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dijabarkan ke lingkup pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

H₁: Sumber daya aparat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

Tingkat Pendidikan Memoderasi Pengaruh Sumber Daya Aparatur Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa

Sumber daya aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki aparat desa untuk melakukan pekerjaan dan komponen penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, sumber daya aparat desa/perangkat desa harus mempunyai kompetensi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh aparat desaan didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai maka dapat menunjang dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban. Tingkat pendidikan aparat yang semakin tinggi akan menjadikan lebih mudah dalam memahami ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku khususnya di bidang akuntansi sector publik. Dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi tentunya lebih mengerti dan lebih paham dalam menjalankan tugas [14]. Dengan sumber daya aparat desa yang dimiliki pemerintah desa dan didukung jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menunjukkan aparat memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik sehingga mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai kompetensinya seperti menyelenggarakan pencatatan hingga menyajikan laporan untuk mendukung ke arah akuntabilitas yang lebih baik. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan *stewardship theory*, bahwa eksekutif sebagai pengelola memiliki peran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dalam konteks pemerintah desa yaitu menjalankan rencana sesuai APBDES dan menyusun laporan realisasi setiap tahap. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

H₂. Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sumber daya aparatur terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi, kaur dan Badan Permusyawaratan Desa berada di desa wilayah Kecamatan Undaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu [8]. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria yaitu:

- 1) Seluruh aparatur desa yang berada di wilayah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus meliputi Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kepala Seksi, Kaur dan Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
- 2) Seluruh aparatur desa yang memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Kudus.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Jawaban yang diperoleh dari responden atas beberapa pertanyaan tentang sumber daya aparatur, tingkat pendidikan dan akuntabilitas alokasi dana desa. Data primer yang diperoleh menggunakan teknik kuesioner secara tertulis kepada responden berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban yang berhubungan dengan variabel penelitian [7].

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur adalah perangkat administrasi negara yang bertugas memberikan pelayanan umum serta adanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat [6]. Oleh karena itu, sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan. [5] menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan desa harus tersedia sumber daya aparatur yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang di berikan kepadanya.

Akuntabilitas Alokasi Dana Publik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban [11].

Tingkat Pendidikan

Sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditempuh oleh seseorang melalui Pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah dan disahkan oleh departemen Pendidikan sebagai bentuk kompetensi yang dimiliki [13].

Adapun pengukuran variabel independent, variable dependen, dan variable moderasi digambarkan dalam bentuk skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan tujuh angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Agak Tidak Setuju, (4) Netral, (5) Agak Setuju, (6) Setuju, (7) Sangat Setuju.

Teknik Analisis

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis *Sruktural Equisition Models* dengan *Warp Partial Least Square/Warp PLS*[9]. Teknik ini dipilih karena, teknik tersebut dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat dengan peran variable moderasi sebagai *pure moderator* dengan basis interaksi. Alasan lain bahwa teknik tersebut dapat digunakan pada jumlah sampel penelitian yang terbatas. Adapun persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Akunt} = a + b_1 \text{SDA} + b_2 \text{SDA} * \text{Pendk} + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Deskripsi responden berdasarkan jabatan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan			
No	Frekuensi	Orang	Persentase
1	Kepala Desa	18	15,65%
2	Sekretaris Desa	16	13,91%
3	Bendahara Desa	10	8,69%
4	Kepala Seksi	33	28,69%
5	Kaur	26	22,61%
6	BPD	12	10,43%
Jumlah		115	100%

Sumber: data primer diolah, 2019

Responden yang menduduki jabatan Kepala Desa sebanyak 18 orang atau 15,65% dari jumlah keseluruhan sample. Jabatan Sekretaris Desa sebanyak 16 orang atau 13,91%, jabatan Bendahara Desa sebanyak 10 orang atau 8,69%. Responden dengan jabatan Kepala Seksi sebanyak 33 orang atau 28,69%, responden dengan jabatan Kaur sebanyak 26 orang atau 22,61% dan responden yang memiliki jabatan BPD sebanyak 12 orang atau 10,43%. Berdasarkan karakteristik jabatan, dapat di simpulkan bahwa sebagian besar perangkat desa yang menjadi responden memiliki jabatan Kepala Seksi karena mereka adalah pelaksana kegiatan secara langsung.

Combined Loadings Dan Cross-Loadings

Hasil *indicator reliability* dari item pembentuk konstruk dimensi sumber daya aparatur (8 item), pendidikan (5 item), dan akuntabilitas dana publik tahap perencanaan (10 item), tahap pelaksanaan (11 item), tahap penatausahaan (8 item), tahap pelaporan (4 item), dan tahap pertanggung jawaban (7 item) adalah valid semuanya dengan nilai *factor loading* yang dihasilkan > 0,7 dan nilai p value < 0.001 (lihat Tabel 2).

Model Fit dan Quality Indices

Hasil kesesuaian dan kualitas model penelitian terlihat pada tabel 3 Model Fit dan *Quality Indices* berikut.

Tabel 3

Model Fit dan *Quality Indices*

Average path coefficient (APC)=0.188, P=0.009
Average R-squared (ARS)=0.229, P=0.003
Average adjusted R-squared (AARS)=0.201, P=0.006
Average block VIF (AVIF)=1.387, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.506, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.362, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.750, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.932, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=0.750, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.750, acceptable if >= 0.7

Sumber: data primer diolah 2019

Pada table 3 model mempunyai fit yang baik, dimana p value untuk *Average Path Coefficient* (APC) sebesar 0.009, *Average R-squared* (ARS) dengan p value sebesar 0.003, dan *Average adjusted R-squared* (AARS) dengan p value sebesar 0.006 dengan nilai APC=0.188, nilai ARS= 0.229 dan nilai AARS = 0.201. Begitu juga dengan nilai *Average block VIF* (AVIF) dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF) yang dihasilkan yaitu < 3.3 yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas antar indicator dan antar variable eksogen. Tenenhaus GoF

(GoF) dihasilkan sebesar $0.362 > 0.36$ yang berarti fit model sangat baik. Untuk indeks Sympton's paradox ratio (SPR), R-squared contribution ratio (RSCR) menghasilkan nilai sama dengan 1 yang berarti tidak ada problem kausalitas didalam model. Demikian juga Statistical suppression ratio (SSR) sebesar $0.750 > 0.7$. Sedangkan untuk indeks non linier bivariate causality direction ratio (NLBCDR) menghasilkan nilai $0.750 > 0.7$ artinya terdapat hubungan kausalitas non linier dalam model.

Path Coefficients dan P Values

Tabel 4 *Path Coefficients dan P Values*

Path Coefficient	P-Values			
Perencanaan	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,156	0,364	0.042	< 0,001
Pelaksanaan	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,321	0,372	< 0,001	< 0,001
Penatausahaan	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,269	0,167	< 0,001	0,032
Pelaporan	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,254	0,037	0,002	0,343
Pertanggung Jwb	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,199	0,206	0,014	0,011
Akuntabilitas	SDA	Pendidik*SDA	SDA	Pendidik*SDA
	0,341	0,243	< 0,001	0,003

Sumber :data primer diolah, 2019

Tabel 4 *output path coefficients* dan *p values* menjelaskan bahwa variable sumber daya aparatur (SDA) berpengaruh langsung dan signifikan pada akuntabilitas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan total akuntabilitas dengan p value masing masing sebesar 0,042, < 0.001, < 0,001, 0,002, 0,014, dan < 0,001 dan path coefficient masing-masing sebesar 0,156, 0,321, 0,269, 0,254, 0,199, dan 0,341. Maka disimpulkan **H1 terdukung**. Sedangkan moderasi tingkat pendidikan (SDA*Pendidik) berpengaruh langsung dan signifikan pada akuntabilitas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, tahap pertanggung jawaban, dan total akuntabilitas dengan p values masing masing sebesar < 0.001, < 0.001, 0,032, 0,011, dan 0,003 namun moderasi tingkat pendidikan (SDA*Pendidik) tidak berpengaruh pada tahap penatausahaan dengan p value sebesar 0,343 dan path coefficient sebesar 0,037. Namun secara keseluruhan tingkat pendidikan terbukti sebagai memoderasi pengaruh SDA terhadap akuntabilitas (**H2 terdukung**)

Latent Variable Coefficients

Hasil uji *latent variable coefficients* dapat dijelaskan pada table 5 berikut.

Tabel 5 *Latent Variable Coefficients*

<u>R-squared coefficients</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI*SDA	
	0.517		
<u>Adjusted R-squared coefficients</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI*SDA	
	0.499		
<u>Composite reliability coefficients</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI	
0.894	0.877	0.898	
<u>Cronbach's alpha coefficients</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI	
0.863	0.842	0.869	
<u>Average variances extracted</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI	
0.519	0.526	0.529	
<u>Full collinearity VIFs</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI	PENDIDI*SDA
2.169	1.275	1.033	1.014
<u>Q-squared coefficients</u>			
SDA	AKUNTAB	PENDIDI*SDA	
	0.508		

Sumber :data primer diolah, 2019

Pada table 5 nilai adjusted R-square sebesar 0,499. Nilai Q-square yang dihasilkan variable akuntabilitas pengelolaan dana sebesar $0,508 > 0$ yang berarti bahwa model mempunyai predictive relevance. Nilai Cronbach's alpha coefficients diatas 0,7 untuk variable sumber daya aparatur, akuntabilitas, dan pendidikan, masing-masing sebesar 0.863; 0,842, 0.869. Hal ini menunjukkan semua reliable untuk semua

variable. Composite reliability coefficients diatas 0,7 untuk variable sumber daya aparatur, akuntabilitas, dan pendidikan masing-masing sebesar 0.894; 0,877; dan 0.898 sehingga memenuhi reliabilitas konsistensi internal. Nilai Average variances extracted (AVE) untuk setiap konstruk dimensi sangat baik yaitu >0,5 untuk variable sumber daya aparatur, akuntabilitas, dan pendidikan masing-masing sebesar 0.519, 0,526, dan 0.529 sehingga telah memenuhi validitas konvergen. Full collinearity VIF untuk setiap konstruk juga sangat baik yaitu < 3,3 untuk variable sumber daya aparatur, akuntabilitas, pendidikan, dan moderasi masing-masing sebesar 2.169; 1,275; 1.033; dan 1,014 sehingga tidak terdapat problem collinearity di dalam model penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji H_1 membuktikan bahwa sumber daya aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan bahwa aparat desa mempunyai kesiapan kompetensi dalam melakukan pekerjaan sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana desadiawali dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban menjadi lebih baik. Temuan ini sejalan dengan [1]; [5]; dan [2] bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Demikian juga hasil uji H_2 membuktikan bahwa tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sumber daya aparatur terhadap akuntabilitas alokasi dana desa untuk tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggung jawaban. Namun tidak didukung untuk tahap penatausahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa juga didukung dari pendidikan aparat desa. Kesiapan aparat desa dalam pelaksanaan APBDes ditunjukkan melalui pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan mengingat latar belakang pendidikan aparat desa beragam sehingga untuk menyamakan pemahaman maka memerlukan pelatihan yang dilakukan secara rutin dan intensif oleh pemerintah daerah. Selain itu pemerintah daerah juga menyelenggarakan program pendampingan untuk setiap desa terkait pengelolaan ADD. Salah satu tugasnya adalah memberikan arahan dan konsultasi masalah tertentu karena keterbatasan kemampuan aparat desa. Namun dalam tahap tertentu seperti tahap penatausahaan ternyata membutuhkan pemahaman yang lebih tentang pencatatan pembukuan sedangkan latar belakang pendidikan aparat desa tidak sama (multidisiplin). Hal ini yang membutuhkan ketrampilan melalui pelatihan program aplikasi siskeudes yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan harapan semua aparat desa dapat menggunakan aplikasi program tersebut untuk menunjang akuntabilitas.

5. KESIMPULAN

Nilai adjusted R-square dihasilkan sebesar 0,499 yang berarti pengaruh sumber daya aparatur dan pendidikan sebagai pemoderasi hanya mampu menjelaskan sebesar 49,9% terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan sisanya 50,1% dipengaruhi variable lain diluar model penelitian ini. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pemerintah daerah tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten dalam melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya aparatur di 16 desa wilayah Kecamatan Undaan.

6. SARAN

Perlu mengembangkan variabel lain dapat mempengaruhi akuntabilitas alokasi dana publik seperti komitmen pemdes dan pengendalian internal agar hasilnya lebih prediktif dibanding sebelumnya. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan dalam memberikan pelatihan kepada aparat desa tentang sistem keuangan desa agar akuntabilitas menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mada, L. Kalangi, and H. Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," pp. 106–115.
- [2] A. Irma, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi," no. 33, pp. 121–137, 2006.
- [3] M. Kholmi, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang," vol. 07, no. 02, pp. 143–152, 2016.
- [4] S. Husna, S. Abdullah, F. Ekonomi, P. S. Akuntansi, and U. S. Kual, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)," vol. 1, no. 1, 2016.
- [5] J. Aset, A. Riset, P. S. Akuntansi, F. Ekonomi, and U. M. Jember, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal juga Pengelolaan Keuangan Desa ialah," vol. 10, no. 1, pp. 105–112, 2018.
- [6] A. Pengelolaan, A. Dana, D. Di, K. Panarukan, P. A. Romantis, and T. Kurrohman, "Akuntabilitas

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014 (Management Accountability Of Alokasi Dana Desa At Panarukan District Situbondo Regency Year 2014),” vol. 2014, 2015.
- [7] R. Fajri, E. Setyowati, J. A. Publik, F. I. Administrasi, and U. Brawijaya, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan , Kecamatan Lawang , Kabupaten Malang),” vol. 3, no. 7, pp. 1099–1104, 2012.
- [8] Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Survei Pada Desa - Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Karawang Timur, Malajaya, Rengasdengklok). *Akuntansi*, hal 580-590.
- [9] Ghozali, Imam dan Latan, Hengky (2016). Partial Least Square. Konsep, Metode dan Aplikasi menggunakan Program Warp PLS 5.0 Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- [10] Mardiasmo. (2003). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi .
- [11] Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa.
- [12] Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Sari, P. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset, Vol 10 (1)*, 105-112.
- [13] Ernawati, 2014. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- [14] Dianawati, Susi. 2008. Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Tabel 2

Combined Loadings Dan Cross-Loadings

Instrument	Loadings	P Value	Keterangan
Sumber Daya Aparatur			
SDA1	0,776	<0.001	Valid
SDA2	0,709	<0.001	Valid
SDA3	0,716	<0.001	Valid
SDA4	0,799	<0.001	Valid
SDA5	0,860	<0.001	Valid
SDA6	0,772	<0.001	Valid
SDA7	0,830	<0.001	Valid
SDA8	0,743	<0.001	Valid
Pendidikan			
PDK1	0,878	<0.001	Valid
PDK2	0,719	<0.001	Valid
PDK3	0,734	<0.001	Valid
PDK4	0,819	<0.001	Valid
PDK5	0,750	<0.001	Valid
Akuntabilitas Tahap Perencanaan			
PRC1	0,765	<0.001	Valid
PRC2	0,741	<0.001	Valid
PRC3	0,789	<0.001	Valid
PRC5	0,727	<0.001	Valid
PRC7	0,711	<0.001	Valid
PRC8	0,720	<0.001	Valid
PRC9	0,721	<0.001	Valid
PRC13	0,703	<0.001	Valid
PRC14	0,783	<0.001	Valid
PRC15	0,823	<0.001	Valid
Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan			
PELS1	0,761	<0.001	Valid
PELS2	0,721	<0.001	Valid
PELS3	0,789	<0.001	Valid
PELS5	0,788	<0.001	Valid
PELS10	0,790	<0.001	Valid
PELS11	0,702	<0.001	Valid
PELS12	0,814	<0.001	Valid
PELS12	0,797	<0.001	Valid
PELS15	0,755	<0.001	Valid
PELS16	0,815	<0.001	Valid
PELS17	0,744	<0.001	Valid
Akuntabilitas Tahap Penatausahaan			
PEN2	0,755	<0.001	Valid
PEN3	0,740	<0.001	Valid

PEN4	0,719	<0.001	Valid
PEN6	0,714	<0.001	Valid
PEN7	0,806	<0.001	Valid
PEN8	0,765	<0.001	Valid
PEN10	0,827	<0.001	Valid
PRN11	0,799	<0.001	Valid
Akuntabilitas Tahap Pelaporan			
PLP1	0,805	<0.001	Valid
PLP2	0,798	<0.001	Valid
PLP3	0,844	<0.001	Valid
PLP4	0,880	<0.001	Valid
Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban			
PTG2	0,755	<0.001	Valid
PTG4	0,782	<0.001	Valid
PTG5	0,821	<0.001	Valid
PTG6	0,769	<0.001	Valid
PTG7	0,760	<0.001	Valid
PTG8	0,815	<0.001	Valid
PTG12	0,763	<0.001	Valid